



Korespondensi

Email¹ : rafiaufamawardi1@gmail.com

Email² : emailnya.rizkipratama@gmail.com



Inovbook Publications

Wisma Monex 9th Floor

Jl. Asia Afrika No 133-137 Bandung,

40112



Karya ini dilisensikan di bawah
Lisensi Internasional Creative
Commons Atribusi Nonkomersial
sharelike 4.0.

PERAN *SOCIAL ENTERPRISE* SEBAGAI INOVASI PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Rafi Aufa Mawardi^{1*}, Muhammad Rizki Pratama^{2*}

^{1,2} Universitas Airlangga | Jl. Dharmawangsa Dalam, Kel. Airlangga,
Kec. Gubeng, Kota SBY, Jawa Timur 60286

Disetujui: 25 Januari 2023

Abstract

Social Enterprise is an innovation in the field of business that plays a role in alleviating the problem of poverty. This article examines the role of Social Enterprise in overcoming the complexity of poverty problems in Indonesia. This study uses qualitative research methods with a literature study approach and social functioning theory as an analytical framework. This study found that there are four fundamental faces of poverty in Indonesia, namely high population growth, escalating unemployment rates, low levels of education, and unequal distribution of income. Researchers analyze that Social Enterprise s exist as external parties whose role is to assist the government in overcoming poverty problems. This can be seen from several functional roles, such as conducting community empowerment, providing microfinance services, and providing free education.

Keywords: *Social Enterprise , Poverty Alleviation, Innovation, Social Functioning, Community Empowerment*

Abstrak

Social Enterprise merupakan suatu inovasi di bidang bisnis yang ikut berperan dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan. Artikel ini mengkaji mengenai peran *Social Enterprise* dalam mengatasi kompleksitas permasalahan kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan teori keberfungsian sosial sebagai kerangka analisis. Studi ini menemukan bahwa ada empat wajah kemiskinan di Indonesia yang cukup fundamental, yaitu pertumbuhan penduduk yang tinggi, eskalasi tingkat pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Peneliti menganalisis bahwa *Social Enterprise* hadir sebagai pihak eksternal yang berperan membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Hal ini terlihat dari beberapa peran fungsionalnya, seperti melakukan pemberdayaan masyarakat, memberikan layanan jasa keuangan mikro, dan menyediakan pendidikan gratis.

Kata Kunci : *Social Enterprise , Pengentasan Kemiskinan, Inovasi, Keberfungsian Sosial, Pemberdayaan Masyarakat*

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang berjuang mengatasi berbagai permasalahan kemiskinan. Fenomena kemiskinan selalu berhimpitan dengan persoalan-persoalan lain dalam aspek sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Realitas kemiskinan pada masyarakat akan berimplikasi terhadap permasalahan lain seperti pengangguran, persoalan kesehatan, meningkatkan kriminalitas, hingga angka kematian yang meningkat. Kemiskinan menjadi satu situasi yang kompleks dan tidak dikehendaki oleh masyarakat itu sendiri (Supriatna, 1997). Menurutnya, masyarakat yang miskin dapat ditilik dalam beberapa hal, seperti rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya pendapatan, rendahnya produktivitas kerja, dan rendahnya kesejahteraan hidup.

Salim (1984) melihat ada beberapa karakteristik masyarakat miskin, yaitu tidak memiliki faktor produksi secara mandiri, tidak memiliki probabilitas untuk mendapatkan aset produksi, tingkat pendidikan yang rendah, umumnya tidak memiliki fasilitas, dan relatif berada di usia muda tanpa kompetensi yang memadai. Cox (2004) menjelaskan ada beberapa penyebab kemiskinan di suatu negara. *Pertama*, kemiskinan sebagai realitas yang diakibatkan oleh kompetisi global (globalisasi). *Kedua*, kemiskinan yang disebabkan oleh pola pembangunan. *Ketiga*, kemiskinan yang dilihat dari situasi dan kondisi sosial pada masyarakat yang tidak berpihak secara baik. *Keempat*, kemiskinan konsekuensial yang merujuk pada faktor eksternal sebagai variabel penyebab kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik (2022) bahwa kemiskinan di Indonesia berada di angka 9,54%. Di mana jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 ini sebesar 26,16 juta orang yang dicatat melalui garis kemiskinan sebesar Rp. 505.469,00/bulan. Walaupun ada penurunan dari segi angka kemiskinan sebesar 0,17%, namun jumlah akumulasi dalam konteks kemiskinan ini masih menunjukkan problematika sosial yang nyata dan faktual. Secara normatif, pemerintah menerapkan dua strategi besar untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan. *Pertama*, melakukan perlindungan intensif pada keluarga dan kelompok masyarakat yang

sedang menghadapi kemiskinan sementara. *Kedua*, membantu secara langsung masyarakat yang menghadapi kemiskinan dengan tingkat yang parah (Kemenkeu, 2022).

Kebijakan pemerintah yang dikonseptualisasikan untuk memutus rantai kemiskinan pada masyarakat harus proporsional dan efektif. Jika tidak proporsional dan efektif, maka kebijakan tersebut hanya bersifat instan dan tidak berdampak signifikan pada upaya penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Dasgupta (2003) melihat bahwa kebijakan yang disusun menjadi program pengentasan kemiskinan harus memenuhi kriteria yang fundamental, seperti spesifik, relevan dengan persoalan, berdasarkan pada kesadaran faktual, mengukur konsekuensi dari implementasi program, dan berbasis pada sumber daya lokal. Oleh karena itu, program pengentasan kemiskinan harus merepresentasikan kriteria umum tersebut, agar berkorelasi positif terhadap menurunnya angka kemiskinan.

Program sebagai kristalisasi dari kebijakan pemerintah untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan harus diselaraskan dengan beberapa faktor-faktor penting. Seperti, program yang diintegrasikan dengan nilai-nilai lokal, menggunakan pendekatan yang integratif dan komprehensif, dan bersifat pengembangan sumber daya manusia (Chambers, 1988). Salah satu program yang merepresentasikan hal-hal tersebut adalah KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang terbukti menunjukkan perubahan di segi sosial, ekonomi, dan infrastruktur (Belasari dkk, 2022). Di sisi lain, ada program Kampung Tematik yang berhasil mengatasi permasalahan kemiskinan dengan mendistribusikan kebutuhan dasar pada desa-desa di Kota Kademangan (Putri dan Mubaroq, 2022). Selain pemerintah yang memiliki kewajiban untuk mengatasi kemiskinan, ada masyarakat – utamanya masyarakat miskin, ada pihak eksternal yang juga ikut berpartisipasi dalam upaya mengatasi persoalan kemiskinan.

Secara umum, pihak eksternal tersebut dimanifestasikan oleh perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Seiring berjalannya waktu, terjadi transformasi dari pada bentuk perusahaan umum yang berorientasi hanya pada keuntungan kepada perusahaan yang berorientasi pada aspek sosial. Perusahaan dengan model baru ini

dikenal dengan *Social Enterprise*. Istilah *Social Enterprise* ini merujuk pada jenis perusahaan yang memiliki tidak hanya melihat aspek keuntungan saja, namun juga aspek sosial. Certo dan Miller (2008) menjelaskan ada tiga karakteristik dari *Social Enterprise*, yaitu memiliki misi untuk menciptakan dan memasifkan nilai sosial tanpa menegasikan nilai *profit*, ukuran performa perusahaan yang dinamis dan cenderung sulit diukur, dan memanfaatkan sumber daya manusia secara sukarela.

Social Enterprise menawarkan inovasi sosial dengan mencerminkan proses eksploitasi yang berhasil dari suatu gagasan baru (Christian, 2021). Di Indonesia sendiri, lahir berbagai *Social Enterprise* dari skala mikro, meso, hingga makro yang saling terintegrasi dalam upaya memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Selain itu, *Social Enterprise* ini juga ikut menunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan secara faktual memberikan dampak kepada masyarakat. *Social Enterprise* menjadi warna baru dalam model bisnis yang mentalikan aspek ekonomi dan sosial di waktu yang bersamaan. Atas dasar ini, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana peran *Social Enterprise* sebagai inovasi dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pemilihan metode ini dimaksudkan demi memperoleh pemahaman yang holistik terkait realitas yang akan diamati dalam proses penelitian ini. Metode kualitatif menggunakan fakta dan informasi yang tersedia untuk mendapatkan kesimpulan dan penjelasan terhadap realitas yang akan diteliti (Cresswell, 2015). Pendekatan studi literatur digunakan dalam penelitian ini. Studi literatur merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan beragam literatur yang tersedia, mulai dari buku, artikel ilmiah, berita, statistik, dan lain sebagainya, sebagai landasan dan pedoman dalam menganalisis realitas sosial. Studi literatur merupakan salah satu wujud kolektivisme ilmu yang terdiri atas beragam himpunan pengetahuan yang diperoleh melalui kegiatan ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya (Neuman, 2014).

Snyder (2019) menjelaskan bahwa terdapat empat tahapan yang harus dilakukan

dalam penelitian studi literatur. Tahap pertama adalah merancang penelitian. Pada tahap ini, peneliti menentukan tema, fokus, dan pertanyaan penelitian. Penentuan ini merupakan hal yang krusial karena memberikan arah dan pedoman bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian. Selain itu, peneliti juga merancang tujuan sekaligus implikasi praktis penelitian, baik terhadap peneliti maupun pembaca. Tahap kedua adalah melakukan proses review. Tahap ini merupakan proses pengumpulan literatur-literatur yang dianggap relevan dengan tema dan fokus penelitian yang mampu membantu menjawab pertanyaan penelitian. Tahap ketiga adalah analisis. Hasil literatur yang telah didapat selanjutnya akan dikategorisasikan, dibandingkan, disederhanakan, dan disatukan agar mampu membantu menggambarkan realitas yang akan diteliti. Tahap terakhir adalah menulis laporan penelitian sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik. Pada tahap ini, peneliti mengkomunikasikan temuan yang diperoleh dalam penelitian kepada pembaca melalui tulisan.

Kerangka analisis dalam penelitian ini menggunakan teori keberfungsian sosial. Keberfungsian sosial dapat didefinisikan sebagai kemampuan individu maupun kelompok untuk dapat menjalankan peran dan fungsi dalam struktur sosial untuk menjaga keserasian di dalam masyarakat (Huraerah, 2005; Wibhawa, 2010; Siporin, 1975). Teori keberfungsian sosial, dalam konteks kemiskinan, melihat bahwa individu atau kelompok yang “sebenarnya” memiliki pengetahuan dan kompetensi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, namun tidak optimal. Keberfungsian sosial juga mencoba untuk mencari aspek korelatif dari jaringan sosial dari pihak eksternal – pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perusahaan, dan lain-lain – dengan masyarakat miskin. Pihak eksternal hadir sebagai otoritas yang memformulasikan kebijakan atau program untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Social Enterprise* : Sebuah *Literature Review*

Peneliti menggunakan beberapa studi terdahulu untuk menjelaskan koherensi dan relevansi *Social Enterprise* sebagai model bisnis

yang memiliki implikasi pada upaya mengatasi permasalahan kemiskinan. *Social Enterprise* menjadi bentuk inovatif dari bisnis di era kontemporer yang telah banyak berdampak buruk bagi aspek-aspek laten, seperti sosial dan lingkungan. Melalui penelitian yang ditulis oleh Hynes (2009) berjudul “*Growing the Social Enterprise – Issues and Challenges*” bahwa *Social Enterprise* berkembang pesat dengan mendorong visi untuk memberikan nilai sosial dan kesejahteraan pada masyarakat sasaran. Visi ini mengalami kompleksitas dari segi implementasi, karena harus bersaing dengan bisnis-bisnis konvensional di pasar komersial. Persoalan yang inheren pada *Social Enterprise* terletak pada kurang sumber daya keuangan, minimnya sumber daya manusia, dan ketidakmampuan untuk memberikan kompensasi gaji yang tinggi.

Hal menarik dari model bisnis *Social Enterprise* adalah faktor ekonomis berada di bawah faktor sosial. Dalam menjalankan ritme bisnis yang baik, maka *Social Enterprise* memberikan kompensasi sosial untuk menarik karyawan maupun konsumen untuk menjadi bagian dari bisnis ini. Tidak dapat dinafikan bahwa era yang serba kapitalis seperti saat ini menstimulasi paradigma masyarakat untuk selalu berorientasi pada aspek ekonomis. Fenomena sosial ini berkorelasi terhadap kesulitan *Social Enterprise* dalam merekrut karyawan, karena memiliki keterbatasan dalam sumber daya keuangan. Oleh karena itu, *Social Enterprise* memberikan satu bentuk legitimasi kepada calon karyawan atau sukarelawan, yaitu kompensasi non-finansial (O’Hara, 2001). Umumnya, kompensasi non-finansial ini dapat dimanifestasikan dalam bentuk sertifikat, hadiah, dan hal-hal lain.

Selain menekankan pada aspek sosial, *Social Enterprise* sebagai model bisnis di era kontemporer ini juga memiliki elemen-elemen yang bersifat fundamental. Hal ini dijelaskan oleh Palesangi (dalam Al-Kahfi, 2019) bahwa elemen dari *Social Enterprise* ada empat, yaitu *social value*, *civil society*, *innovation*, dan *economic activity*. Pertama, *social value* atau nilai sosial ini berkaitan dengan visi perusahaan untuk mendiseminasi dampak sosial kepada masyarakat dan menjadi poin diferensiasi dengan perusahaan konvensional. Kedua, *civil society* atau masyarakat sipil ini menjadi subjek dan objek dari *Social Enterprise* dalam bergerak menjalankan model bisnisnya.

Sehingga partisipasi aktif dari masyarakat begitu penting untuk memberikan optimalisasi dari segi produktivitas perusahaan. Ketiga, *innovation* atau inovasi sebagai pembaharuan berkelanjutan dari *Social Enterprise* untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Keempat, *economic activity* atau aktivitas ekonomi harus diselaraskan dengan aktivitas sosial.

Tidak sampai di situ, penelitian yang ditulis oleh Al-Kahfi (2019) dengan judul “*Social Enterprise Berbasis Ekonomi Proteksi*” ini menjelaskan bahwa penerapan ekonomi proteksi dalam basis *Social Enterprise* memberikan dampak pada lahirnya usaha dari masyarakat dan perlindungan pada usaha masyarakat. Lahirnya usaha pada masyarakat ini dibentuk dari proses partisipasi secara aktif maupun pasif pada bergeraknya roda bisnis. *Social Enterprise* juga membuka diri untuk berkolaborasi dan bekerja sama dengan masyarakat. Di lain sisi, perlindungan usaha pada masyarakat ini bertalian dengan usaha *Social Enterprise* untuk memproteksi berbagai potensi buruk dari bisnis yang dijalankan oleh masyarakat. Misalnya, dengan mereduksi adanya kemungkinan persaingan bisnis dengan produk sejenis, lalu meminimalisir adanya produk selain dari *Social Enterprise*, dan mengembangkan sistem pasar yang adil bagi produk *Social Enterprise*.

Dari studi terdahulu di atas, maka dapat dipahami bahwa *Social Enterprise* merupakan lini bisnis yang menekankan pada aspek sosial secara fundamental. Model bisnis yang inheren dengan faktor sosial ini memperkuat nilai intensionalitas secara sosial dengan adanya karyawan dengan gaji yang relatif rendah atau sukarelawan. Kemudian, *Social Enterprise* juga terbukti secara ilmiah melakukan perlindungan pada usaha yang dijalankan oleh masyarakat. Dalam hal ini, penelitian ini memiliki fokus kajian yang lebih spesifik pada irisan antara *Social Enterprise* dengan permasalahan kemiskinan di Indonesia. Peneliti ingin menganalisis optimalisasi dari peran *Social Enterprise* dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang sangat kompleks di Indonesia.

Perkembangan dari *Social Enterprise* sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat akan model bisnis yang partisipatif dan ramah akan lingkungan. Bahkan, *Social Enterprise* ini oleh masyarakat juga dielaborasi sebagai bentuk pendekatan bisnis pada model koperasi.

Hal ini diterangkan oleh Hartanti dan Setiaji (2020) dalam artikel berjudul "Implementasi *Social Entrepreneurship* Pada Koperasi Wanita Srikandi". Menurutnya, model bisnis *social entrepreneurship* atau *Social Enterprise* ini diinisiasi akan suatu kesadaran kolektif akan permasalahan di masyarakat – utamanya terkait ekonomi. Aspek misi sosial diinternalisasikan sebagai nyawa dari koperasi untuk dapat membangun sistem yang efektif dari segi unit usaha, yaitu simpan pinjam dan unit produksi. Dalam penelitian ini, diungkapkan bahwa *Social Enterprise* berdampak secara positif pada eskalasi sumber daya manusia, pengembangan sumber daya alam, dan peningkatan di sektor ekonomi lokal.

Selain itu, model bisnis *Social Enterprise* ini juga sampai pada aspek pariwisata dan irisannya dengan ekonomi lokal. Proposisi ini diterangkan secara komprehensif oleh Cakranegara, dkk (2020) bahwa kewirausahaan sosial atau *Social Enterprise* adalah solusi untuk mereduksi disparitas pada dunia usaha dengan menjalin kemitraan dengan usaha lain dan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan *Social Enterprise* sangat ditentukan oleh karakteristik dari pengusaha yang memiliki jiwa sosial tinggi, inovatif, kreatif, dan berani untuk mengambil keputusan di kondisi yang dinamis. Aspek pariwisata yang sempat surut akibat pandemi COVID-19 mampu ditingkatkan lagi dengan proses kewirausahaan sosial dan kolaborasi simetris dengan pemerintah serta *stakeholder* lain. Dengan itu, maka *Social Enterprise* hadir sebagai satu inovasi yang meningkatkan ekonomi lokal ketika keadaan sosial-ekonomi global sedang bermasalah.

Fokus dan isu yang diangkat oleh *Social Enterprise* memang sangat beragam, mulai dari ekonomi, sosial, teknologi, pengelolaan sampah, dan masih banyak lagi. Selain penjelasan di atas yang fokus pada dampak *Social Enterprise* pada sektor ekonomi, ternyata sektor pendidikan juga menjadi satu bagian yang relevan dan proporsional dalam *Social Enterprise*. Hal ini dapat dilihat dari penelitian yang ditulis oleh Sobirin (2021) mengenai implementasi *Social Enterprise* di SMP Juara Bandung. SMP Juara Bandung adalah manifestasi dari model *Social Enterprise* di sektor pendidikan dengan menggratiskan biaya operasional pendidikan bagi siswa yang tidak mampu. Biaya operasional pendidikan ini akan

ditanggung oleh Rumah Zakat sebagai donatur utama SMP Juara Bandung. Strategi bisnis yang diejawantahkan oleh SMP Juara Bandung adalah dengan melakukan subsidi silang antara siswa umum kepada siswa yang tidak mampu. Selain itu, aspek kepemimpinan, kerja sama, dan kolaborasi adalah tiga variabel yang menentukan keberhasilan dari implementasi *Social Enterprise* di sektor pendidikan ini.

Dari beberapa studi terdahulu di atas dapat diketahui bahwa *Social Enterprise* berdampak secara multidimensi pada beberapa sektor. Dampak paling umum dan utama adalah bagaimana implementasi dari *Social Enterprise* berimplikasi secara positif pada ekonomi lokal masyarakat. Selain itu, *Social Enterprise* juga menjadi suatu solusi inovatif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata yang sempat terdampak oleh pandemi COVID-19. Di satu sisi, *Social Enterprise* memberikan dampak positif di sektor pendidikan yang inklusif dan egaliter. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki diferensiasi secara substansial terkait fokus kajian yang lebih khusus melihat optimalisasi peran *Social Enterprise* dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia.

Social Enterprise meneguhkan semangat perubahan yang holistik dalam upaya menuju kondisi sosial-ekonomi yang lebih baik. Menurut Perrini dan Vurro (2006) bahwa *Social Enterprise* atau kewirausahaan sosial menjadi instrumen bisnis yang mendukung adanya suatu perubahan sosial di masyarakat. *Social Enterprise* secara fungsional menghadirkan komponen kreativitas dan inovasi pada bentuk kewirausahaan untuk menunjang transisi perubahan ke arah yang positif. Ini yang menjadi justifikasi bahwa *Social Enterprise* dianggap menjadi inisiator dalam berinovasi di bidang bisnis dan aspek cakupannya yang luas, seperti memecahkan permasalahan sosial-ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemberian dampak yang sifatnya terukur bagi masyarakat.

Tidak berhenti di situ, *Social Enterprise* juga diasosiasikan sebagai gerakan bisnis-sosial dari masyarakat untuk memangkas kemiskinan di suatu daerah. Berdirinya *Social Enterprise* memiliki tujuan laten untuk menanggalkan berbagai bentuk permasalahan sosial di masyarakat – termasuk kemiskinan. *Social Enterprise* seakan menjadi variabel alternatif – selain pemerintah dan swasta –

untuk memantik pertumbuhan ekonomi masyarakat tanpa memperburuk keadaannya. Pemerintah sebagai pihak yang berotoritas masih terjebak di dalam kondisi masyarakat yang kurang berkualitas dan cenderung rendah. Berbagai persoalan masih menempel di setiap kebijakan pengentasan kemiskinan yang dicanangkan pemerintah. Misalnya, persoalan korupsi pada anggaran kebijakan, kualitas sumber daya manusia yang rendah, kebijakan yang belum tepat sasaran, terbatasnya aksesibilitas kepada masyarakat sasaran, dan lain sebagainya.

Atas dasar ini, *Social Enterprise* menjelma sebagai kesadaran sosial masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan dengan menggunakan kendaraan bisnis model baru. Penelitian berjudul "Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Kewirausahaan Sosial" yang ditulis oleh Firdaus (2014) bahwa *social business* – atau dalam terminologi ini disebut sebagai *Social Enterprise* – memiliki peran yang cukup sentral dalam membangun ekonomi masyarakat. Bentuk dari *Social Enterprise* ini direpresentasikan oleh Bina Swadaya dan Mitra Bali yang menjalankan peran utamanya untuk menyelesaikan permasalahan sosial, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia yang implikasinya pada kemiskinan. Yang menarik, lahirnya *Social Enterprise* ini merupakan respon dari pemerintah yang dirasa gagal dalam memberikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Penelitian lain yang ikut memberikan penjelasan akademis mengenai kegiatan *Social Enterprise* dan kemiskinan adalah penelitian yang ditulis oleh Yusriadi, dkk (2020) dengan judul "Pengentasan Kemiskinan Melalui *Socialpreneur*". Penelitian ini secara faktual mencoba menyoroti fenomena pandemi COVID-19 yang berdampak negatif pada kemiskinan di wilayah pedesaan. Kegiatan *sociopreneur* atau *Social Enterprise* yang membawa misi sosial untuk memutus rantai kemiskinan yang berkepanjangan ini menggunakan pendekatan *community development* atau pemberdayaan masyarakat. Jadi, *Social Enterprise* di sini diimplementasikan dalam bentuk pemberdayaan kepada ibu-ibu melalui pembuatan sabun cuci, jajanan tradisional, dan kegiatan konveksi. Dalam derajat ini, ibu-ibu sebagai subjek dari *Social Enterprise* diberikan

pemahaman komprehensif dan praktis mengenai mekanisme pembuatan barang-barang tersebut. Kemudian, juga diberikan sosialisasi dan edukasi dalam konteks bisnisnya, seperti desain produk, melakukan pemasaran, mengatur keuangan bisnis, dan lain sebagainya.

Dari studi terdahulu di atas, maka dapat diinterpretasikan bahwa *Social Enterprise* memang memiliki dampak yang faktual pada permasalahan kemiskinan di suatu daerah. *Social Enterprise* membawa narasi positif mengenai perubahan sosial yang dimulai dari masyarakat dan untuk masyarakat. Akan tetapi, yang menjadi titik diferensiasi dari penelitian ini adalah fokus kajian dan analisis mengenai optimalisasi peran *Social Enterprise* dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia yang lebih komprehensif. Kemudian, substansi yang akan dikembangkan dalam penelitian ini ialah dengan menggambarkan bagaimana situasi dan kondisi kemiskinan di Indonesia secara objektif. Setelah itu, analisis dan elaborasi mengenai peran *Social Enterprise* dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan di Indonesia akan dinarasikan secara lengkap serta mendalam.

B. Wajah Kompleksitas Kemiskinan di Indonesia

Indonesia merupakan negara di kawasan Asia Tenggara yang masuk ke dalam 100 negara termiskin di dunia. Menurut *World Population Review* (2022), Indonesia menduduki posisi ke-73 dengan *Gross National Income* (GNI) sebesar 3.870 USD. GNI sendiri adalah pendapatan nasional bruto per kapita di setiap negara yang dikalkulasi dari interval pendapatan akumulatif negara dibagi dengan populasi masyarakatnya. Walaupun Indonesia masih cukup baik secara urutan ranking daripada negara-negara Asia Tenggara lain, seperti Myanmar, Kamboja, Timor Leste, Vietnam, dan Filipina. Akan tetapi, data ini memberikan satu gambaran bahwa Indonesia masih tenggelam dalam lautan kemiskinan yang menimpa masyarakat secara masif.

Kemiskinan masih menjadi monster yang menakutkan bagi Indonesia – dan bahkan negara-negara pada umumnya. Permasalahan kemiskinan merupakan gelombang pasang yang dapat menerjang masyarakat di berbagai wilayah dan berimplikasi pada lahirnya problematika baru yang negatif. Menurut

Nugroho (1995), umumnya masyarakat yang mengalami kondisi miskin adalah kelompok yang belum menyentuh standar hidup yang layak. Hal ini dapat dilihat dari tidak terakomodasinya beberapa kebutuhan hidup, seperti pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal layak. Tidak tercapainya proses akomodasi standar hidup dari masyarakat miskin ini ditengarai oleh pendapatannya yang relatif kecil dan jauh dari rata-rata pendapatan per kapita negara. Bagaikan efek domino, kecilnya pendapatan ini berdampak pada kegagalan masyarakat untuk mengakses berbagai kebutuhan fundamental.

Selain itu, Sharp, dkk (1996) menggambarkan bahwa penyebab lahirnya fenomena kemiskinan adalah aspek atau dimensi ekonomi. Menurutnya, kemiskinan terjadi akibat ketidakselarasan pola kepemilikan sumber daya yang berkorelasi terhadap alokasi pendapatan yang tidak proporsional dan adil. Di satu sisi, rendahnya kualitas dan kapabilitas dari sumber daya manusia juga muncul sebagai variabel yang mendegradasi produktivitas di ruang-ruang pekerjaan. Lahirnya fenomena kemiskinan di masyarakat juga timbul dari aksesibilitas terhadap modal yang timpang dan terdiferensiasi dari struktur sosial serta kelas-kelas sosialnya. Kompleksitas yang mewarnai fenomena kemiskinan ini terjadi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Jumlah penduduk yang mencapai 270 juta jiwa dengan heterogenitas dari suku, ras, agama, dan budaya menambah kerumitan akan fakta sosial-kemiskinan di dalamnya.

Indonesia mengalami dinamika permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks. Berbagai aspek multidimensional hadir menyertai berbagai kompleksitas bentuk permasalahan kemiskinan di Indonesia. *Pertama*, pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi di Indonesia merupakan fenomena kompleks dan alamiah dari masyarakat dan berdampak pada realitas kemiskinan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi acap kali melekat pada negara-negara berkembang – seperti Indonesia. Pertumbuhan penduduk merujuk pada peningkatan dan pengurangan penduduk di suatu daerah. Pertumbuhan penduduk awalnya membawa pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, ketika pertumbuhan penduduk telah melampaui

kapasitas optimum, maka berpengaruh terhadap penurunan dari segi pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2010).

Di era orde baru, ada program Keluarga Berencana yang dicanangkan sebagai program untuk menekan angka pertumbuhan penduduk yang meningkat. Melansir dari Badan Pusat Statistik (2022) bahwa laju pertumbuhan penduduk di Indonesia di tahun 2022 adalah 1,17. Angka ini memang menunjukkan penurunan dari tahun-tahun sebelumnya yang berada di angka 1,25 di tahun 2020 dan 1,22 di tahun 2021. Pertumbuhan penduduk yang terjadi di suatu negara berpengaruh secara langsung terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Jika pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan yang signifikan tanpa ditopang kebutuhan sosialnya oleh negara, maka akan menyebabkan lahirnya fenomena kemiskinan yang tidak terbandung.

Perlu diingat bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diimbangi oleh pemerataan pembangunan, maka angka kemiskinan akan bertambah. Pertumbuhan penduduk yang tinggi di Indonesia mencerminkan bagaimana fenomena kemiskinan selalu mengikuti di belakangnya. Jumlah penduduk yang menyentuh angka 273 juta jiwa dan diproyeksikan akan terus meningkat menjadi variabel yang membayangi permasalahan kemiskinan. Ketika negara tidak mampu untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai dan akomodatif bagi seluruh masyarakat, tentu kemiskinan menjadi konsekuensi logis. Tidak hanya itu, pembangunan yang tidak merata dan sangat sentralistik memperkeruh kondisi kemiskinan di Indonesia.

Kedua, eskalasi tingkat pengangguran. Pengangguran adalah kondisi di mana masyarakat berusia aktif tidak memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika masyarakat mengalami pengangguran, maka sudah pasti akan memasuki wahana kemiskinan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di tahun 2022 adalah 5,83% – walaupun mengalami penurunan – namun masih masih memperlihatkan angka kemiskinan yang tinggi. Kemiskinan merupakan situasi problematis yang lahir atas beberapa hal, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, motivasi yang rendah, dan minimnya lapangan pekerjaan yang proporsional. Oleh karena itu, semakin

tinggi tingkat pengangguran akan berkorelasi terhadap meningkatnya angka kemiskinan di suatu daerah. Persoalan pengangguran masih menjadi beban kompleks dan permasalahan yang terjadi di Indonesia.

Ketiga, rendahnya tingkat pendidikan. Pendidikan adalah inkubator bagi lahirnya masyarakat yang memiliki kompetensi dan kapabilitas di berbagai bidang. Ketika masyarakat tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak, maka hal ini menjadi pemantik untuk munculnya permasalahan kemiskinan. Hal ini dapat terjadi karena masyarakat yang tidak terdidik memiliki kemampuan di bawah standarisasi dan kualifikasi pekerjaan formal. Sehingga rendahnya tingkat pendidikan pada masyarakat akan membawa pada mental, kognitif, dan kompetensi yang buruk. Beririsan dengan substansi di atas, bahwa rendahnya tingkat pendidikan pada masyarakat akan menyebabkan pengangguran sebagai bentuk dari permasalahan kemiskinan di Indonesia.

Melansir dari data yang dirilis oleh Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2021) bahwa tingkat pendidikan di Indonesia masih cukup rendah. Hal ini dapat terlihat dari 273 juta penduduk di Indonesia yang menamatkan pendidikan hingga Perguruan Tinggi adalah 17,08 juta (16,7%). Di lain sisi, penduduk yang menamatkan tingkat pendidikan SMP adalah 39,67 juta (14,57%) dan di tingkat SMA adalah 56,15 juta (20,63%). Sehingga akumulasi total yang bersekolah hingga jenjang sekolah lanjut pertama dan atas adalah 95,82 juta (35,2%). Sedangkan ada 64,84 juta (23,82%) yang menamatkan pendidikan hingga tidak pendidikan dasar (SD). Dari data ini dapat ditilik bahwa tingkat pendidikan dari masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Hal ini tentu menjadi problematika serius karena memiliki irisan dengan fenomena kemiskinan sebagai realitas faktual.

Keempat, distribusi pendapatan yang tidak merata. Masyarakat di usia produktif yang sedang bekerja pasti memiliki orientasi ekonomis untuk mendapatkan pendapatan. Akan tetapi, terjadi distribusi pendapatan yang tidak merata kepada masyarakat dari berbagai stratifikasi sosial. Distribusi pendapatan yang tidak merata kepada masyarakat menjadi cikal bakal dari munculnya permasalahan kemiskinan. Pendapatan yang tidak merata

akan mengakibatkan jurang pemisah antara masyarakat yang kaya dan yang miskin. Ketika hal ini terjadi, disparitas sosial yang tidak dapat dibendung akan menghasilkan suatu bentuk kemiskinan. Secara normatif, distribusi pendapatan adalah mekanisme dan instrumen untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Indonesia yang cenderung sentralistik dalam hal pembangunan membuat ada ketimpangan dari distribusi pendapatan di daerah-daerah. Oleh karena itu, permasalahan ini menjadi salah satu bentuk kompleksitas kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

C. Social Enterprise sebagai Inovasi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Sektor bisnis konvensional telah banyak terdisrupsi dengan mengarah pada lini bisnis yang diselaraskan dengan kebutuhan dan partisipasi sosial masyarakat. Bisnis konvensional yang cenderung menampilkan kegiatan produksi dan berorientasi untuk menghasilkan *profit* sebanyak mungkin tanpa meninjau aspek lain – sosial dan lingkungan – mengalami transformasi positif ke arah yang lebih akomodatif. Transformasi yang terjadi juga merepresentasikan narasi mengenai *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai bentuk komitmen negara-negara di dunia untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan tidak terkungkung pada aspek ekonomi saja, namun juga wajib memperhatikan aspek sosial-masyarakat dan lingkungan hidup.

Perubahan dan kesadaran dari beberapa orang di lini bisnis menggerakkan satu narasi untuk mulai mengintegrasikan aspek bisnis konvensional dengan sosial. Terminologi atau konsep yang mencerminkan dari transformasi paradigmatis ini dikenal dengan *Social Enterprise*. Menurut Certo dan Miller (2008), ada tiga cara untuk mengenai *Social Enterprise*. *Pertama*, misi objektif yang diinternalisasi dalam roda bisnis adalah misi sosial untuk memberikan dampak secara nyata pada masyarakat – tanpa mengurangi aspek *profit*. *Kedua*, model bisnis cenderung mengalami kompleksitas dalam melakukan pengukuran pada performa kinerja. Sebab, narasi daripada misi yang dibawa adalah misi sosial dan secara interval tidak dapat diukur seperti aspek ekonomi. *Ketiga*, lini bisnis ini sering kali memanfaatkan sumber daya manusia secara

sukarela (*volunteer*) dengan memperkenalkan nilai-nilai sosial sebagai daya tarik.

Pada konteks ini, *Social Enterprise* menyimpan satu misi untuk memotong akar kemiskinan di suatu daerah yang diselaraskan dengan produk atau jasa bisnisnya. Akan tetapi, umumnya *Social Enterprise* percaya bahwa proses pemberdayaan masyarakat menjadi sebuah jalan untuk mencerdaskan masyarakat dan mengasah kompetensinya agar dapat terhindar dari jeratan kemiskinan. Di Indonesia, *Social Enterprise* memiliki variasi yang beragam dari produk atau jasa bisnis yang ditelurkan. Hal ini tentu akan berkorelasi terhadap efektivitas dan intensitas dari *Social Enterprise* tersebut dalam memformulasikan program pengentasan kemiskinan. Perlu diketahui bahwa kemiskinan merupakan fakta sosial yang kompleks dan multidimensional. Untuk memutuskan tali kemiskinan yang panjang, maka harus diselesaikan permasalahan kunci yang menjadi faktor penyebab kemiskinan.

Pertama, kemiskinan di Indonesia secara teoritis banyak disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia. Dunia pekerjaan yang semakin kompetitif mengharuskan adanya eskalasi kompetensi dan kapabilitas di bidang tertentu untuk menunjang perekonomiannya. Dalam konteks ini, *Social Enterprise* membawa sebuah misi sosial untuk melakukan pemberdayaan secara intensif dan sistematis dalam rangka meningkatkan kualitas dari masyarakat tersebut. *Social Enterprise* sebagai lini bisnis yang dinamis dan berorientasi pada misi sosial akan menciptakan rangkaian proses pemberdayaan masyarakat, mulai dari melakukan proses persiapan, tahapan pengkajian, tahapan perencanaan program, tahap implementasi program, dan tahap evaluasi. Oleh karena itu, *Social Enterprise* menjadi organ eksternal yang melakukan upaya pengentasan kemiskinan dengan cara-cara sistematis, seperti pemberdayaan masyarakat.

Proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh *Social Enterprise* ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang berdaya. Menciptakan masyarakat berdaya ini terdiri dari beberapa aspek. Aspek pertama, yaitu usaha dari *Social Enterprise* untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas dari masyarakat agar dapat mendapatkan pekerjaan yang layak. Lalu, aspek kedua, yaitu

usaha dari *Social Enterprise* untuk menanam bibit-bibit wirausahawan baru dengan produk atau jasa yang dimilikinya. Misalnya, masyarakat miskin yang menjadi wirausahawan di bidang konveksi atau bidang kuliner adalah beberapa hasil dari proses pemberdayaan intensif dari *Social Enterprise*. Ketika masyarakat berani untuk berbisnis dan memiliki kompetensi di bidang tertentu, maka hal ini menjadi catatan baik untuk menghapus angka kemiskinan di Indonesia. Serta, secara tidak langsung hal ini ikut meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Kedua, beberapa permasalahan kemiskinan di Indonesia terjadi karena distribusi pendapatan yang tidak merata dan minimnya pendapatan. Beberapa *Social Enterprise* di Indonesia yang bergerak di bidang jasa keuangan mikro berusaha untuk melakukan peminjaman uang kepada masyarakat miskin. Selain itu, *Social Enterprise* di bidang jasa keuangan ini juga melakukan proses penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dalam interval waktu tertentu. Hal ini juga sebagai upaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya menabung dan tidak hidup boros tanpa kalkulasi yang terukur. Kemudian, *Social Enterprise* ini juga membuka layanan pembiayaan bagi masyarakat miskin berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Beberapa cara-cara ini menjadi mekanisme bagi *Social Enterprise* untuk memfasilitasi masyarakat miskin dalam konteks keuangan dan upaya untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Indonesia.

Ketiga, Indonesia masih terjerat akan rendahnya pendidikan pada masyarakat yang berdampak pada permasalahan kemiskinan. Di beberapa *Social Enterprise* di bidang pendidikan menyediakan berbagai fasilitas gratis untuk masyarakat miskin dapat mengenyam proses pembelajaran yang setara. Acap kali keterbatasan pendapatan dari orang tua membuat anak-anak tidak mendapatkan akses pendidikan. Sehingga hal ini akan melahirkan lingkaran setan dari masyarakat miskin dan sulit untuk keluar dari jeratan kemiskinan. Pendidikan adalah solusi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menjadi jalan pembuka di gerbang-gerbang pekerjaan. Kualifikasi pekerjaan yang tinggi dan harus lulusan tingkat pendidikan tertentu

membuat *Social Enterprise* berinisiatif untuk membuka layanan belajar gratis atau beasiswa pendidikan untuk siswa terkategori miskin. Cara ini merepresentasikan fungsi sosial dari *Social Enterprise* untuk mengatasi problematika kemiskinan di Indonesia.

Secara praksis, *Social Enterprise* di Indonesia telah mengejawantahkan berbagai peran dalam spektrum keberfungsian sosial yang telah dijelaskan di atas. Namun, secara elaboratif, penulis ingin mencoba menganalisis menggunakan pendekatan keberfungsian sosial. Pendekatan ini melihat bahwa *Social Enterprise* adalah manifestasi dari kemampuan individu atau kelompok dalam mendistribusikan aspek-aspek positif kepada masyarakat miskin. *Social Enterprise* merupakan subjek yang menjalankan proses-proses sosial-fungsional dalam rangka membangun sumber daya manusia yang dilemahkan oleh sistem – seperti yang dibahas dalam pendekatan demokrasi-sosial. Sebagai suatu sintesis, maka pendekatan keberfungsian sosial ingin melemparkan suatu gagasan yang konkret dengan tindakan sosial yang faktual dan tidak utopis.

Menurut pandangan dari Suharto (2009), pendekatan keberfungsian sosial melihat apa yang dimiliki oleh masyarakat miskin dan tendensi positif apa yang dapat diakselerasikan oleh individu atau kelompok berdaya – dalam hal ini *Social Enterprise*. *Social Enterprise* tidak hanya memberikan modal ekonomi kepada masyarakat miskin, namun juga memberikan modal sosial yang dikonversikan ke dalam berbagai program-program pemberdayaan dan edukasi. *Social Enterprise* berupaya untuk menstimulasi konstruksi sosial dari masyarakat miskin yang fatalis menjadi optimis mengenai hidup. Mereka dibimbing, dididik, dan diberdayakan melalui agenda-agenda sosial yang inheren akan nilai-nilai positif.

Tabel 1. Manifestasi Peran *Social Enterprise* untuk Mengatasi Kemiskinan di Indonesia

No	Nama	Peran Sosial
1	Tanijoy	<i>Social Enterprise</i> yang bertujuan untuk membentuk ekosistem pertanian dan menghubungkan petani melalui teknologi.
2	Ecodoe	<i>Social Enterprise</i> yang menawarkan souvenir dan hadiah buatan tangan untuk perusahaan dan klien pemerintah.
3	Du Anyam	<i>Social Enterprise</i> yang bertujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui kerajinan anyaman
4	Mitra Bali	<i>Social Enterprise</i> yang berfokus pada pembangunan sosial dan ekonomi dengan

No	Nama	Peran Sosial
		melakukan pemberdayaan kelompok pengrajin
5	Bina Swadaya	<i>Social Enterprise</i> yang memiliki layanan keuangan mikro melalui Koperasi Bina Swadaya Nusantara dan perbankan mikro untuk sektor perekonomian rakyat
6	Lumbang Dana Indonesia	<i>Social Enterprise</i> berkomitmen untuk menyediakan alternatif akses keuangan melalui transformasi jasa keuangan dan bertujuan meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan ekonomi Indonesia
7	Mahoni Edukasi Digital	<i>Social Enterprise</i> yang mengembangkan aplikasi digital untuk memberikan edukasi secara gratis.
8	Solve Education!	<i>Social Enterprise</i> pendidikan inovatif dan gratis yang dapat diakses oleh masyarakat dari berbagai kelas ekonomi
9	We The Teachers (WTT)	<i>Social Enterprise</i> yang fokus untuk meningkatkan kondisi guru dengan memberikan sesi pengembangan, perancangan, dan pemetaan kualitas siswa melalui observasi kelas

Sumber : Data Sekunder

IV. KESIMPULAN

Social Enterprise merupakan model bisnis di era kontemporer yang lahir dari kesadaran kolektif praktisi bisnis akan pentingnya memberikan dampak secara sosial kepada masyarakat. Secara koheren, *Social Enterprise* memiliki dampak secara faktual terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia. Hal ini tercermin dari beberapa cara dan program yang dilakukan sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan. *Pertama*, *Social Enterprise* melakukan proses pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi masyarakat agar dapat bersaing di dunia profesional serta menjadi praktisi bisnis baru. *Kedua*, *Social Enterprise* yang bergerak di jasa keuangan memberikan layanan pinjaman kepada masyarakat miskin serta memberikan edukasi akan pentingnya mengatur keuangan secara kalkulatif. *Ketiga*, *Social Enterprise* yang bergerak di bidang pendidikan menyediakan layanan pendidikan secara gratis dan beasiswa pendidikan untuk masyarakat miskin sebagai bentuk komitmen dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Indonesia.

Bagi peneliti selanjutnya, topik mengenai *Social Enterprise* dapat diteliti secara lebih komprehensif terkait eksistensi, fungsi, dan perannya. Mengingat, *Social Enterprise* merupakan model bisnis di era kontemporer yang memiliki implikasi positif terhadap beberapa sektor, seperti sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat melihat dampak secara makro dan mikro dari *Social Enterprise*

terhadap beberapa sektor fundamental di Indonesia. Dengan hal ini, masyarakat akan mendapatkan wawasan mengenai *Social Enterprise* dari sisi substansi dan praksisnya. Sehingga partisipasi masyarakat untuk berkontribusi melalui platform *Social Enterprise* akan meningkat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih terhadap pihak-pihak yang berkontribusi dan membantu penulisan artikel ini sehingga artikel ini dapat ditulis secara maksimal.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kahfi, M. F. (2020). *Social Enterprise Berbasis Ekonomi Proteksi*. Khazanah: Jurnal Mahasiswa. Vol. 11, No. 2. <https://journal.uui.ac.id/khazanah/article/download/16662/10463>.
- Belasari, B., Rahman, B., & Ranto, R. (2022). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebagai Inovasi dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020. *Jurnal Studi Inovasi*, 2(2), 1-16. <https://jurnal.studiinovasi.id/jsi/article/download/85/51>.
- BPS Indonesia. 2022. Berita Resmi Statistik. <https://www.bps.go.id/>.
- Christian, Y. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Inovatif dalam Mendukung Kemajuan Daerah Perkotaan. *Jurnal Studi Inovasi*, 1(1), 52-61. <https://jurnal.studiinovasi.id/jsi/article/download/10/9>.
- Certo, S. T., & Miller, T. (2008). *Social Entrepreneurship: Key Issues and Concepts*. *Business Horizons*. Vol. 51, No. 4, Hal. 267-271. <http://www.igntu.ac.in/eContent/IGNTU-eContent-861724313123-MSW-4-Dr.HanjabamShukhdebaSharma-SocialEntrepreneurship-1,2,3,4,5.pdf>.
- Chambers, Robert. (1988). *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. Jakarta: LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial).
- Cox, David. (2004). *Outline of Presentation on Poverty Alleviation Programs in The Asia Pacific Region*. Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial. 2 Maret 2004.
- Cresswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dasgupta, P. (2003) *Social Capital and Economic Performance: Analytics*. In: Ostrom, E. and Ahn, T., Eds., *Foundations of Social Capital*, Edward Elgar, Cheltenham, Hal. 309-339.
- Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (2021). *Berita Resmi Dukcapil Kemendagri*. <https://dukcapil.kemendagri.go.id/>.
- DuBois, Brenda., & Karla Krogsrud Miley. (1992). *Social Work: An Empowering Profession*. Boston: Allyn and Bacon.
- Febriana, E. (2010). *Strategi untuk peningkatan pendapatan rumah tangga petani miskin di perdesaan: studi kasus pada rumah tangga petani miskin di desa Cisaat Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi* (Doctoral dissertation, Universitas Indonesia. Fakultas Ekonomi).
- Firdaus, Nur. (2014). *Pengentasan Kemiskinan melalui Pendekatan Kewirausahaan Sosial*. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*. Vol. 22, No.1, Hal. 55-67. <https://jurnalekonomi.lipi.go.id/index.php/JEP/article/download/29/13>.
- Hartanti, V. G., & Setiaji, K. (2020). *Implementasi Social Entrepreneurship pada Koperasi Wanita Srikandi*. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*. Vol. 12, No. 2. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE/article/download/29772/17079>.
- Hynes, Briga. (2009). *Growing The Social Enterprise – Issues and Challenges*. *Social Enterprise Journal*. Vol. 5, No. 2, Hal. 114-125. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/17508610910981707/full/html?casa_token=F4uFl_Hq4MkAAAA:0frp028h-FjTcew71oYtWvcJinKLOGDUZIS6mBA59g6qeCs0JKhsCj09B7JbgMntA-2Jv2_sCFqR1_QQzSUA-7j0FIXKiIX_OokUpQwGvpz-7uNLFvs.
- Huraerah, Abu. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Penerbit Humaniora.
- Kementerian Keuangan Indonesia. (2021). *Berita Resmi Kemenkeu*. <https://www.kemenkeu.go.id/home>.

- Kuncoro, Mudrajad. (2010). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Fokusmedia.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Essex: Pearson Education Limited.
- O'Hara, P. (2001), Ireland: *Social Enterprises and Local Development in Borzaga*. The Emergence of *Social Enterprise*, Routledge.
- Perrini, F., & C. Vurro. (2006). *Social Entrepreneurship: Innovation and Social Change Across Theory and Practice*. New York (USA): Palgrave Macmillan.
- Putri, M., & Mubaroq, H. (2022). Strategi Pengimplementasian Konsep Kampung Tematik sebagai Wujud Masyarakat untuk Mengentaskan Desa 3T (Studi kasus: Kampung Tematik Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo). *Jurnal Studi Inovasi*, 2(1), 1-8.
<https://jurnal.studiinovasi.id/jsi/article/download/72/41>.
- Salim, Emil. (1984). *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan*. Jakarta: Inti Dayu.
- Sharp, Ansel M, dkk. (1996). *Economic of Social Issue*. Edisi Ke-12. Richard D. Irwin. Chicago.
- Siporin, Max (1975). *Introduction to Social Work Practice*. New York: Macmillan Publishing. Co, Inc.
- Snyder, H. (2019). *Literature Review as A Research Methodology: An Overview and Guidelines*. *Journal of Business Research*, 104, 333-339.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296319304564>.
- Sobirin, Muhammad. (2021). Implementasi Usaha Sosial (*Social Enterprise*) di SMP Juara Bandung. *Tsaqafatuna: Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 3, No. 2.
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2319976&val=19776&title=implementasi%20usaha%20sosial%20social%20enterprise%20di%20smp%20juara%20bandung>.
- Supriatna, Tjahya. (1997). *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan kemiskinan*. Bandung. Humaniora Utama Press (HUP).
- Suharto, Edi. (2008). *Kebijakan Sosial Sebagai kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Wibhawa, Budi, dkk. (2010). *Dasar-dasar Pekerjaan Sosial*. Bandung: Widya Padjajaran.
- World Population View. (2022). *Indonesia Population 2022 (Live)*.
<https://worldpopulationreview.com/countries/indonesia-population>.
- Cakranegara, P. A., Rahadi, D. R., & Sinuraya, S. D. (2020). Model Kewirausahaan Sosial Berbasis Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Sektor Pariwisata di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 8(2), 189-205.
<https://scholar.archive.org/work/4ni64f7hwfdtpgk4ltysw64t6u/access/wayback/http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jmdk/article/download/4318/pdf>.